



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2024



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 92);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2024 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari

32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

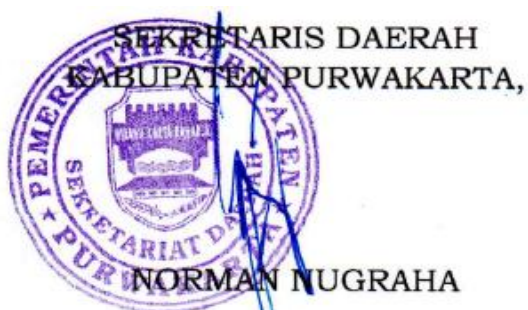
Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 14 Agustus 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 14 Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
NORMAN NUGRAHA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 telah selesai disusun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta berusaha melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dijadikan acuan dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Mudah-mudahan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas.

Purwakarta, 20 Agustus 2024

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purwakarta



[Signature]
H. Wahyu Wibisono
NIP. 196708291995031001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	9
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA	25
IV. PENUTUP	37



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024	10
Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	14
Tabel 3.1 Matriks Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang di persyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD pada khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Renja PD Perubahan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja PD Perubahan merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit PD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD bahkan RPJPD. Renja PD Perubahan berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja PD Perubahan sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur profesional dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta diperlukan perencanaan yang benar-benar tepat guna dan terarah.



Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dijadikan acuan penyusunan rancangan APBD Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;



22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 47)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tahun 2024 adalah sebagai pedoman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yaitu :

- a. Sebagai penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
- b. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024;
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten purwakarta berdasarkan capaian target kinerja program yang telah ditetapkan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi



pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik

BAB. IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta memiliki 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub Kegiatan dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Purwakarta. Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 mengacu pada tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 meliputi:

Program Teknis Urusan Kepegawaian

1. Program Kepegawaian Daerah, dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) Kegiatan dan terdiri dari 16 (enam belas) Sub Kegiatan.

Program Teknis Urusan Pendidikan dan pelatihan

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dioperasionalkan ke dalam 2 (dua) Kegiatan dan terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan.

Selain program tersebut di atas, pelaksanaan kinerja juga di tunjang oleh program pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dioperasionalkan ke dalam 8 (delapan) Kegiatan dan terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Sub kegiatan.

Evaluasi capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Tinggi	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	100
3.	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik	-	0

1. Tingkat Profesionalitas ASN

Tingkat Profesionalisme/ Profesionalitas Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan dengan pengukuran menggunakan standar dan kriteria tertentu. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi sebagai upaya

pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi. Sumber data pengukuran diambil dari data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pendataan ulang PNS (e-PUPNS), penilaian prestasi kinerja PNS dan data hukuman disiplin pegawai. IP ASN Kabupaten Purwakarta semester 1 tahun 2024 yaitu **89,09 (tinggi)** dari jumlah dengan rincian yaitu :

1. Dimensi *Kualifikasi* sebesar 20,11 (Dua puluh koma sebelas) dari bobot 25 atau 80,44%;
2. Dimensi *Kompetensi* memperoleh nilai sebesar 38,73 (Tiga puluh delapan koma tujuh puluh tiga) atau 96, 83% dari Bobot dimensi 40;
3. Dimensi *Kinerja* sebesar 25,25 (Dua puluh lima koma dua puluh lima) atau 84,17% dari Bobot dimensi 30;
4. Dimensi *Disiplin* memperoleh nilai sebesar 5 (lima) dari bobot dimensi 5 atau capaian 100%.

2. Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai kumulatif **84,40** (Delapan puluh empat koma empat puluh) dengan predikat **A (Memuaskan)**. Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

- 1) *Perencanaan Kinerja* sebesar 26,40 (Dua puluh enam koma empat puluh) atau 83% dari bobot 30;
- 2) *Pengukuran Kinerja* sebesar 24,00 (Dua Puluh empat koma nol) atau 80% dari nilai bobot 30;
- 3) *Pelaporan Kinerja* memperoleh nilai sebesar 12,75 (Dua belas koma tujuh puluh lima) atau 82% dari bobot nilai 15;
- 4) *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal* memperoleh nilai sebesar 21,25 (Dua puluh satu koma dua puluh lima) atau 85% dari nilai bobot 25.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya. Pada semester 1 tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai indeks **3,5431 (sangat baik)** atau 88,58% dengan rincian unsur sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana
2. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
3. Prilaku pelaksana
4. Kompetensi Pelaksana
5. Produk Spesifikasi Jenis layanan
6. Biaya/Tarif
7. Waktu Penyelesaian
8. Sistem, mekanisme dan Prosedur
9. Persyaratan

4. Indeks Sistem Merit Kabupaten

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Indeks sistem merit adalah ukuran yang dipakai sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah.



Berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Terdapat 8 Aspek penilaian sistem merit yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan
2. Pengadaan
3. Pengebangan Karir
4. Mutasi dan Promosi
5. Manajemen Kinerja
6. Pengganjian, Penghargaan dan Disiplin
7. Perlindungan dan Pelayanan
8. Sistem Informasi

Adapun untuk hasil sistem merit semester pertama tahun 2024 sedang dalam penilaian mandiri dan verifikasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Untuk hasil sistem merit 2024 akan diumumkan di akhir tahun oleh KASN.

Lebih lanjut pencapaian kinerja Renja dapat dilihat pada table 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Per Triwulan II berikut :

Tabel 2.2
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan I Tahun 2024			Selisih		Catatan/ Permasalahan
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				38.617.529.518		149,85	9.015.755.505	29.348.922.013	23,35	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				38.617.529.518			9.015.755.505	29.348.922.013	23,35	
5	03				KEPEGAWAIAN				34.514.841.218		89,85	8.688.675.505	25.826.165.713	25,17	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				29.128.325.618			7.439.233.450	21.441.092.168	25,54	
						1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah		A Predikat			A Predikat				
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	141.776.000			15.870.901	125.905.099	11,19	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Dokumen	46.697.700	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2.414.650	44.283.050	5,17	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	17.070.700	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3.456.000	13.614.700	20,25	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	14.297.100	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	14.297.100	0,00	

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan I Tahun 2024			Selisih		Catatan/ Permasalahan
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	20.201.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	5.906.751	14.294.240	29,24	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	43.509.500	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Laporan	4.093.500	39.416.000	9,41	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	25.377.121.438		-	6.043.108.128	19.086.013.310	23,81	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.00 Orang/ bulan	25.327.115.238	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.00 Orang/ bulan	6.036.531.328	19.042.583.910	23,83	Gaji PPPK dialihkan ke Perangkat Daerah sesuai Penempatan
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Dokumen	14.947.200	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	14.947.200	0,00	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	15.305.600	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	4.155.600	11.150.00	27,15	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.00 Laporan	19.753.400	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Laporan	2.421.200	17.332.200	12,26	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada BKPSDM		100 Persen	14.950.400		-	4.330.000	10.620.400	28,96	
5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	14.950.400	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	4.330.000	10.620.400	28,96	

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan I Tahun 2024			Selisih		Catatan/ Permasalahan
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100 Persen	173.746.200		-	41.247.500	132.498.700	23,74	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.00 Paket	61.067.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	36.247.500	24.819.500	59,36	
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	14.812.300	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	14.812.300	0,00	
5	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	18.330.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5.000.000	13.330.000	27,28	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.00 Orang	40.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	40.000.000	0,00	
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.00 Orang	39.536.900	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	39.536.900	0,00	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1.099.143.250		-	480.822.946	618.260.304	43,75	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Paket	59.829.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	29.912.000	29.917.000	50,00	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.00 Paket	188.019.850	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.00 Paket	185.403.850	616.000	99,67	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	30.738.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	30.738.000	0	100,00	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	150.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	69.667.000	80.333.000	46,44	

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan I Tahun 2024			Selisih		Catatan/ Permasalahan
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Paket	95.854.400	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	95.854.400	0,00	
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Paket	159.702.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	79.841.000	79.861.000	49,99	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Laporan	60.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	60.000.000	0,00	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Laporan	170.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.00 Laporan	83.321.096	86.678.904	49,01	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Dokumen	35.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	35.000.000	0,00	
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Dokumen	150.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	150.000.000	0,00	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	278.820.150		-	234.601.200	44.218.950	84,14	
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	35.940.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	35.940.000	0	100,00	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Unit	198.766.200	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	198.661.200	105.000	99,95	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Unit	44.113.950	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.00 Unit	0	44.113.950	0,00	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1.618.548.180		-	588.834.375	1.029.713.805	36,38	

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan I Tahun 2024			Selisih		Catatan/ Permasalahan
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	6.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	4.000.000	2.000.000	66,67	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Laporan	411.286.672	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Laporan	82.137.566	329.149.106	19,97	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.00 Laporan	1.201.261.508	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.00 Laporan	502.696.809	698.564.699	41,85	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	424.220.000		-	30.358.400	393.861.600	7,16	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.00 Unit	134.800.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Unit	4.498.400	130.301.600	3,34	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.00 Unit	59.760.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	59.760.000	0,00	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Unit	200.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	200.000.000	0,00	
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.00 Unit	29.660.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.00 Unit	25.860.000	3.800.000	87,19	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.386.515.600		-	1.249.442.055	4.132.221.545	23,20	
						1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		80,88 Persen			85,77		106,05		

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan I Tahun 2024			Selisih		Catatan/ Permasalahan
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
						2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		16,99 Persen			18,97		111,65		
						3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		49,80 Persen			62,12		124,74		
						4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		34,00 Orang			29,00		85,29		
						5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		172,00 Orang			171,00		99,42		
						6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		504,00 Orang			520,00		103,17		
						7. Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai		0,29 Persen			0,13		223,08		
						8. Persentase Pemberhentian ASN		5,73 Persen			2,00		34,90		
						9. Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa		2,15 Persen			0,00		0,00		
						10. Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai		100,00 Persen			0,00		0,00		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100 Persen	1.540.906.000		-	577.556.641	958.497.359	37,48	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	1.000.050.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	366.964.941	633.085.059	36,69	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.00 Dokumen	225.500.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	97.414.600	128.085.400	43,20	

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan I Tahun 2024			Selisih		Catatan/ Permasalahan
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	132.356.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		55.577.100	76.778.900	41,99	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	183.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	57.600.000	120.548.000	31,48	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya kualitas Mutasi dan Promosi ASN			1.937.860.000			215.410.664	1.722.449.336	11,12	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.00 Dokumen	190.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Dokumen	14.970.000	175.030.000	7,88	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	1.747.860.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	200.440.664	1.547.419.336	11,47	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi ASN			1.286.500.000		-	244.513.450	1.041.986.550	19,01	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.00 Orang	305.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.00 Orang	119.927.250	185.072.750	39,32	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	310.250.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	112.586.200	197.663.800	36,29	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.00 Orang	205.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12.000.000	193.000.000	5,85	
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	66.250.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	66.250.000	0,00	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.00 Orang	75.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	75.000.000	0,00	

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan I Tahun 2024			Selisih		Catatan/ Permasalahan
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.00 Orang	250.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	250.000.000	0,00	
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	75.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0	75.000.000	0,00	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			621.249.600		-	211.961.300	409.288.300	34,12	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	173.750.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30.615.500	143.134.500	17,62	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Orang	347.499.600	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Orang	149.842.100	197.657.500	43,12	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	100.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	31.503.700	68.496.300	31,50	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.102.688.300		60,00	372.080.000	3.775.608.300	7,97	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				4.102.688.300			372.080.000	3.775.608.300	7,97	
						1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		25,00 Persen			0,00		0,00		
						2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		1,00 Persen			2,40		240,00		
						3. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		51,01 Persen			0,00		0,00		
						4. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		2,86 Persen			0,00		0,00		

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan I Tahun 2024			Selisih		Catatan/ Permasalahan
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi ASN		100 Persen	1.282.598.300		-	276.080.000	1.006.518.300	21,53	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50,00 Orang	1.282.598.300	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.00 Orang	276.080.000	1.006.518.300	21,53	Kegiatan sedang dilaksanakan dan pembayaran belum penuh
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		100 Persen	2.820.090.000		-	51.000.000	2.769.090.000	1,81	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00 Laporan	2.820.090.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	51.000.000	2.769.090.000	1,81	Kegiatan sedang dilaksanakan dan pembayaran belum penuh
JUMLAH									38.617.529.518			9.015.755.505	29.348.922.013	23,35	

Tabel 2.2 diatas terlihat anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian kegiatan/program/sasaran strategi akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 38.617.529.518,- dengan realisasi keuangan sampai triwulan II atau semester pertama tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.015.755.505,- atau penyerapan anggaran sebesar 23,35%. Sedangkan capaian kinerja 149,85%.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja pogram/kegiatan/sub kegiatan, sebagaimana evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta triwulan II tahun 2024, disimpulkan sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong

1. Koordinasi yang baik antara bidang dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta yang dikoordinasikan oleh sekretariat dalam hal ini Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dan dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan.

2. Faktor Penghambat

1. Penyesuaian pembelian barang/jasa melalui e-purchasing/ e-katalog
2. Adanya Rasionalisasi anggaran yang berdampak terhadap target kinerja beberapa sub kegiatan yang tidak dapat di penuhi.
3. Adanya efisiensi anggaran di beberapa sub kegiatan.



3. Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Melakukan Langkah-langkah persiapan dan penyesuaian terhadap dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan mekanisme dan tahapan perencanaan, penganggaran serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan startegi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka Langkah operasional yang harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategi yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Selanjutnya rician program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Purwakarta lebih lengkap dapat di lihat pada Tabel Matriks Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibawah ini :

Tabel 3.1
MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2024			Selisih		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				38.617.529.518			35.201.765.892	(3.415.763.626)	(8,85)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				38.617.529.518			35.201.765.892	(3.415.763.626)	(8,85)	
5	03				KEPEGAWAIAN				34.514.841.218			31.533.146.592	(2.981.694.626)	(8,64)	BKPSDM
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				29.128.325.618			26.488.150.992	(2.640.174.626)	(9,06)	BKPSDM
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah		A Predikat			A Predikat				
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	141.776.000		100 Persen	141.776.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Dokumen	46.697.700	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Dokumen	46.697.700	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	17.070.700	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	17.070.700	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	14.297.100	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	14.297.100	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	20.201.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	20.201.000	0	0,00	BKPSDM

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2024			Selisih		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	43.509.500	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	43.509.500	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	25.377.121.438		100 Persen	22.931.224.720	(2.445.896.718)	(9,64)	BKPSDM
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.00 Orang/bulan	25.327.115.238	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.00 Orang/bulan	22.881.218.520	(2.445.896.718)	(9,66)	BKPSDM
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Dokumen	14.947.200	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Dokumen	14.947.200	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	15.305.600	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	15.305.600	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.00 Laporan	19.753.400	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.00 Laporan	19.753.400	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada BKPSDM		100 Persen	14.950.400		100 Persen	14.950.400	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	14.950.400	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	14.950.400	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100 Persen	173.746.200		100 Persen	199.433.900	25.687.700	14,78	BKPSDM
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.00 Paket	61.067.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.00 Paket	101.567.000	40.500.000	66,32	BKPSDM

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2024			Selisih		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	14.812.300	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	0	(14.812.300)	(100,00)	BKPSDM
5	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	18.330.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	18.330.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.00 Orang	40.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.00 Orang	40.000.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.00 Orang	39.536.900	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.00 Orang	39.536.900	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1.099.143.250		100 Persen	998.498.259	(100.645.000)	(9,16)	BKPSDM
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Paket	59.829.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Paket	59.829.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.00 Paket	188.019.850	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.00 Paket	197.374.850	9.355.000	4,98	BKPSDM
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	30.738.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	30.738.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	150.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	150.000.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Paket	95.854.400	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Paket	95.854.400	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Paket	159.702.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Paket	159.702.000	0	0,00	BKPSDM

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2024			Selisih		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Laporan	60.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Laporan	0	(60.000.000)	(100,00)	BKPSDM
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Laporan	170.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Laporan	170.000.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Dokumen	35.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	35.000.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Dokumen	150.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	100.000.000	(50.000.000)	(33,33)	BKPSDM
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	278.820.150		100 Persen	278.820.150	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	35.940.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	35.940.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	0	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Unit	198.766.200	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Unit	198.766.200	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Unit	44.113.950	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Unit	44.113.950	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1.618.548.180		100 Persen	1.499.227.572	(119.320.608)	(7,37)	BKPSDM
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	6.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	6.000.000	0	0,00	BKPSDM

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2024			Selisih		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Laporan	411.286.672	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Laporan	291.966.064	(119.320.608)	(29,01)	BKPSDM
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.00 Laporan	1.201.261.508	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.00 Laporan	1.201.261.508	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	424.220.000		100 Persen	424.220.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.00 Unit	134.800.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.00 Unit	134.800.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.00 Unit	59.760.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.00 Unit	59.760.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Unit	200.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Unit	200.000.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.00 Unit	29.660.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.00 Unit	29.660.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.386.515.600			5.044.995.600	(341.520.000)	(6,34)	BKPSDM
						Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		80,88 Persen			80,88 Persen				
						Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		16,99 Persen			16,99 Persen				
						Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		49,80 Persen			49,80 Persen				

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2024			Selisih		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
						Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		34,00 Orang			34,00 Orang				
						Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		172,00 Orang			172,00 Orang				
						Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		504,00 Orang			504,00 Orang				
						Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai		0,29 Persen			0,29 Persen				
						Persentase Pemberhentian ASN		5,73 Persen			5,73 Persen				
						Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa		2,15 Persen			2,15 Persen				
						Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai		100,00 Persen			100,00 Persen				
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100 Persen	1.540.906.000		100 Persen	1.469.416.000	(71.490.000)	(4,64)	BKPSDM
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Dokumen	0	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	0	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	1.000.050.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	1.000.050.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	0	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.00 Dokumen	225.500.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.00 Dokumen	225.500.000	0	0,00	BKPSDM

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2024			Selisih		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	0	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Lembaga	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Lembaga	0	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	132.356.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	109.057.000	(23.299.000)	(17,60)	BKPSDM
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	0	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	183.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	134.809.000	(48.191.000)	(26,33)	BKPSDM
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya kualitas Mutasi dan Promosi ASN		100 Persen	1.937.860.000			1.762.830.000	(175.030.000)	(9,03)	BKPSDM
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Dokumen		Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					BKPSDM
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.00 Dokumen	190.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14.970.000	(175.030.000)	(92,12)	BKPSDM
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	1.747.860.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.747.860.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi ASN		100 Persen	1.286.500.000			1.191.500.000	(95.000.000)	(7,38)	BKPSDM
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.00 Orang	305.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		305.000.000	0	0,00	BKPSDM

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2024			Selisih		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	310.250.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		354.250.000	44.000.000	14,18	BKPSDM
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.00 Orang	205.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		166.000.000	(39.000.000)	(19,02)	BKPSDM
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	66.250.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		66.250.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.00 Orang	75.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		75.000.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.00 Orang	250.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150.000.000	(100.000.000)	(40,00)	BKPSDM
5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	75.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		75.000.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100 Persen	621.249.600			621.249.600	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	173.750.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		173.750.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.00 Orang	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.00 Orang	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0	0	0,00	BKPSDM

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2024			Selisih		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Orang	347.499.600	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		347.499.600	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	100.000.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000	0	0,00	BKPSDM
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0	0	0,00	BKPSDM
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.102.688.300			3.668.619.300	(434.069.000)	(10,58)	BKPSDM
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				4.102.688.300			3.668.619.300	(434.069.000)	(10,58)	BKPSDM
						Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		25,00 Persen			25,00 Persen				
						Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		1,00 Persen			1,00 Persen				
						Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		51,01 Persen			51,01 Persen				
						Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		2,86 Persen			2,86 Persen				
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi ASN</i>		100 Persen	1.282.598.300		100 Persen	1.197.098.300	(85.500.000)	(6,67)	BKPSDM
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50,00 Orang	1.282.598.300	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50,00 Orang	1.197.098.300	(85.500.000)	(6,67)	BKPSDM

Kode					Perangkat Daerah/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	Murni Tahun 2024 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2024			Selisih		Perangkat Daerah
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1					2	3		5	6	7	8	9	10 (9-6)	11	12
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		100 Persen	2.820.090.000		100 Persen	2.471.521.000	(348.569.000.)	(12,36)	BKPSDM
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00 Laporan	2.820.090.000	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00 Laporan	2.471.521.000	(348.569.000.)	(12,36)	BKPSDM
JUMLAH									38.617.529.518			35,201,765.892	(3.415.763.626)	(8,85)	



Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan tahun anggaran 2024, maka total anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta melalui Perubahan Renja 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pagu awal Renja : Rp. 39.833.428.518
2. Pagu awal APBD : Rp. 38.617.529.518
3. Pagu Perubahan (RKPD) : Rp. 35.201.765.892
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap pagu Renja : - Rp. 4.631.662.626
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap pagu APBD : - Rp. 3.415.763.626

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan renja, disebabkan karena ada penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu sub kegiatan APBD. Sedangkan antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan renja dikarenakan terdapat efisiensi anggaran.



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta 2024-2026 mengacu pada proses penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah. Dalam rangka memaksimalkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 20 Agustus 2024

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purwakarta



[Signature]
H. Wahyu Wibisono
NIP. 196708291995031001

LEMBAR VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2024

NAMA PD : BKPSDM KAB. PURWAKARTA

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	SISTEMATIKA : BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PENUTUP	✓	
2	BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	✓	
	1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	✓	
	1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.	✓	
	1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓	
3	BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.	✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
4	BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik	✓	
5	BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup	✓	
6	KESESUAIAN DENGAN RKPD PERUBAHAN Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program dan kegiatan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan	✓	

CATATAN TINDAK LANJUT :

- Sistematika sudah sesuai

- poin 6. Sesuai dengan RKPD Perubahan 2024

PURWAKARTA, 9 AGUSTUS 2024

KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

VERIFIKATOR,

(.....
Dewi : 8.....)

NIP. 197708172009012002

(.....
Ari MATHURAH S. MSi.....)

NIP. 197212291996012001

MENGETAHUI,

KEPALA BIDANG.....
.....
.....
NIP. 197408641995031001